

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dirancang untuk menguji peran kualitas tata kelola berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai mekanisme moderasi dalam hubungan antara *tax planning* dan risiko reputasi perusahaan. Dalam penelitian ini, risiko reputasi tersebut diproksikan melalui nilai perusahaan (Ln_Tobins_Q), dengan asumsi bahwa apresiasi pasar melalui harga saham merupakan cerminan objektif dari kepercayaan investor terhadap reputasi dan integritas fiskal perusahaan, dengan menggunakan data panel dari 10 perusahaan sektor barang konsumen di BEI (2022–2024).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan apabila dilihat secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ESG saja belum cukup kuat untuk secara langsung membentuk persepsi pasar terhadap nilai maupun reputasi perusahaan. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh masih terbatasnya perhatian investor terhadap informasi non-keuangan, serta adanya kecenderungan pasar yang masih lebih berfokus pada kinerja keuangan dalam jangka pendek. Selain itu, dampak ESG juga tidak selalu muncul secara instan, melainkan membutuhkan waktu hingga benar-benar tercermin dalam nilai perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan temuan yang lebih bermakna ketika ESG dikaitkan dengan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, kepatuhan pajak yang diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terbukti mampu memperkuat hubungan antara ESG dan reputasi perusahaan. Artinya, ESG akan memberikan dampak yang lebih nyata apabila perusahaan juga menunjukkan perilaku perpajakan yang baik dan transparan. Dengan demikian, tujuan penelitian pertama dapat dikatakan tercapai, yaitu bahwa ESG mampu memperlemah dampak negatif dari praktik *tax planning* terhadap risiko reputasi perusahaan. Perusahaan

Febi Tesselonika Putri Sihombing, 2026

PERAN KUALITAS TATA KELOLA BERBASIS ESG DALAM MEMODERASI PENGARUH TAX PLANNING TERHADAP RISIKO REPUTASI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang tetap menjaga kepatuhan pajak akan dipersepsikan lebih konsisten dan bertanggung jawab, sehingga risiko penilaian negatif akibat strategi efisiensi pajak dapat diminimalkan.

ESG berfungsi sebagai bantalan reputasi yang mampu menjaga citra perusahaan tetap positif, bahkan ketika perusahaan menerapkan strategi efisiensi pajak yang masih berada dalam batas kewajaran. Sebaliknya, apabila perusahaan menunjukkan tingkat ESG yang tinggi namun tidak diiringi dengan kepatuhan pajak yang memadai, maka akan muncul ketidaksesuaian antara narasi dan praktik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif, karena ESG dapat dipandang hanya sebagai bentuk pencitraan atau tidak mencerminkan komitmen yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya fungsi perlindungan ESG yang tidak berjalan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko reputasi perusahaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ESG tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun dan menjaga reputasi perusahaan. Perlu adanya dukungan dari aspek tata kelola lainnya, terutama kepatuhan pajak, agar manfaat ESG dapat dirasakan secara optimal. Dengan demikian, sinergi antara pengungkapan ESG dan praktik perpajakan yang bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam menciptakan reputasi perusahaan yang kuat dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa investasi dalam pengungkapan ESG tidak akan menghasilkan premium nilai yang optimal apabila tidak dibarengi dengan tata kelola perpajakan yang bertanggung jawab dan transparan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan disarankan untuk tidak memisahkan kebijakan ESG dan kebijakan perpajakan sebagai dua domain yang berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikannya dalam satu kerangka strategi korporasi yang koheren agar efisiensi pajak tidak merusak integritas komitmen ESG. Memprioritaskan Transparansi Fiskal dalam Laporan Keberlanjutan. Perusahaan disarankan untuk mengadopsi praktik *ESG-linked tax disclosure* secara sukarela dengan mengungkapkan informasi kebijakan pajak, tarif pajak efektif, dan kontribusi pajak

secara eksplisit dalam laporan keberlanjutan. Keterbukaan ini tidak hanya memperkuat konsistensi sinyal ESG di mata investor, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih luas terhadap integritas tata kelola perusahaan. Menghindari Agresivitas Pajak yang Berpotensi Merusak Reputasi. Penelitian ini memberikan bukti bahwa inkonsistensi antara klaim komitmen ESG dan perilaku fiskal yang agresif dapat memicu skeptisisme investor dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap skema perencanaan pajak dengan mempertimbangkan tidak hanya dampak finansial, tetapi juga risiko reputasi yang mungkin timbul.

Mendorong Standarisasi dan Verifikasi Independen Pelaporan ESG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) disarankan untuk memperkuat regulasi pelaporan ESG, khususnya terkait standar pengungkapan dan mekanisme verifikasi independen, guna meningkatkan komparabilitas dan akuntabilitas serta meminimalkan risiko *greenwashing*. Mengintegrasikan Dimensi Fiskal dalam Kerangka Indeks ESG Pasar Modal. BEI disarankan untuk mempertimbangkan penambahan transparansi perpajakan sebagai salah satu kriteria dalam indeks ESG, sehingga dapat mendorong perilaku kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan kualitas informasi ESG bagi investor. Mempercepat Implementasi Regulasi Pajak Minimum Global dan Edukasi Publik. Kementerian Keuangan disarankan untuk mempersiapkan implementasi Pajak Minimum Global 15% serta melakukan edukasi kepada publik dan pelaku pasar modal agar ekspektasi pasar lebih realistis dan tidak menimbulkan volatilitas yang berlebihan.

Memperluas Cakupan Sampel dan Sektor Industri. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke seluruh sektor di BEI dengan jumlah observasi yang lebih besar dan periode yang lebih panjang agar meningkatkan kekuatan statistik dan memungkinkan generalisasi temuan. Menggunakan Proksi Pengukuran ESG yang Lebih Komprehensif. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan skor ESG dari lembaga pemeringkat independen agar mengurangi bias self-reporting dan menghasilkan pengukuran yang lebih valid dan reliabel. Menerapkan Metode Analisis Panel Data yang Lebih Canggih. Penelitian

Febi Tesselonika Putri Sihombing, 2026

PERAN KUALITAS TATA KELOLA BERBASIS ESG DALAM MEMODERASI PENGARUH TAX PLANNING TERHADAP RISIKO REPUTASI PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM), *Random Effects Model* (REM), atau metode lanjutan seperti IV dan GMM untuk mengatasi autokorelasi dan potensi endogenitas. Menguji Dampak Implementasi Pajak Minimum Global terhadap Hubungan ESG-Nilai Perusahaan. Penelitian selanjutnya memiliki peluang untuk menguji perubahan hubungan antara *tax planning*, ESG, dan nilai perusahaan setelah implementasi kebijakan global tersebut melalui studi longitudinal.

Penelitian ini memberikan titik awal yang bermakna dalam memahami interaksi antara tata kelola keberlanjutan dan perilaku fiskal korporasi di Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, temuan ini perlu diuji dan diperdalam agar kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab semakin nyata.